



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 14
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat 1 ke-2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 9 Februari 2022
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: - Laporan Panja 7 (Tujuh) RUU tentang Provinsi ke Raker Tingkat I; - Pendapat Akhir Mini Fraksi, DPD RI, dan Pemerintah; dan - Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Draf 7 (Tujuh) RUU tentang Provinsi.
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 36 (tiga puluh enam) Anggota Komisi II DPR RI dari 52 (lima puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI B. Komite I DPD RI; C. Menteri Dalam Negeri RI; D. Menteri Keuangan RI; E. Menteri PPN/ Bappenas RI; dan F. Menteri Hukum dan HAM RI.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda laporan Panja 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi ke Raker Tingkat 1, penyampaian pendapat mini fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan Draf 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, pada hari Rabu, 9

Februari 2022, dibuka pukul 10.38 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda laporan Panja 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi ke Raker Tingkat 1, penyampaian pendapat mini fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan Draft 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

1. Laporan Panja 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia **Nomor: R-54/Pres/11/2021 tanggal 30 November 2021**, perihal Penunjukan wakil Pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas dan Menteri Hukum dan HAM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Pemerintah dalam membahas RUU tersebut.
 - b. Berdasarkan **Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 13 Januari 2022, dengan Surat** dari Pimpinan DPR RI Nomor: T/69/PW.11.01/01/2022 tanggal 18 Januari 2022 memutuskan dan menyetujui bahwa **pembahasan terhadap 7 (tujuh) RUU Usul DPR RI tersebut diserahkan kepada Komisi II DPR RI.**
 - c. Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi Komisi II DPR RI pada tanggal 7 Februari 2022, telah melaksanakan sejumlah kegiatan, antara lain:
 - i. Rapat Kerja Panja RUU Provinsi pada tanggal 07 Februari 2022, dengan agenda rapat adalah Penjelasan Pengusul, Tanggapan Pemerintah dan DPD RI, Pembentukan Panja dan dilanjutkan Penyerahan DIM.
 - ii. RDPU dengan Kementerian Dalam Negeri, Kemenkumham, Kemenkeu, dan DPD RI, pada tanggal 8 Februari 2022, Jam 10 – 13.00 dalam rangka membahas Rancangan UU/Membahas DIM, sekaligus Pembentukan Timus/Timsin.
 - iii. Rapat Timus/Timsin, pada tanggal 8 Februari 2022, Jam 13.30 – 22.00.
 - iv. Rapat Kerja, tanggal 9 Februari 2022, dengan agenda Pendapat Akhir Mini Fraksi – Fraksi, Pengambilan Keputusan dan Penandatanganan Draft RUU 7 RUU Provinsi.
2. Penyampaian pendapat mini fraksi-fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, sebagai berikut:
 - a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi

Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara).

- b. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrat menyetujui 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara) dengan catatan.
- c. DPD RI menyetujui 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara).
- d. Pemerintah menyetujui 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara).

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Kerja Tingkat 1 ke -2 Komisi II DPR RI dengan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, dengan agenda laporan Panja 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi ke Raker Tingkat 1, penyampaian pendapat mini fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan Draft 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani draft 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara).

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.44 WIB.

Jakarta, 9 Februari 2022

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANJUNGA

A-270